

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KELUARGA
TERHADAP ANAK DIFABEL**

(Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ROUSAN FIKRI

NPM : 1521010033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KELUARGA
TERHADAP ANAK DIFABEL**

(Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
ROUSAN FIKRI
NPM : 1521010033

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Pandangan keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel, berpendapat bahwa pendidikan anak cukup dengan pendidikan di SLB. Hal ini disebabkan faktor sibuknya orang tua karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimanakah peran keluarga terhadap anak difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung? dan kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak difabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran keluarga terhadap anak difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak difabel.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer melalui wawancara dengan 6 keluarga yang berada di Kecamatan Sukabumi, yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui *editing*, *coding* dan rekonstruksi data serta dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pertama, peran keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Sukabumi dalam menghadapi anak difabel, mereka yang berperan aktif, menyadari akan kewajiban orang tua terhadap anak, sedangkan yang tidak berperan aktif mereka berdalih dalam mengasuh anaknya cukup menyekolahkan dan memenuhi kebutuhannya secara finansial. Hal itu terjadi karena faktor sibuknya orang tua yang sama-sama bekerja, kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan juga karena kurangnya pengetahuan tentang kewajiban orang tua yang seharusnya diberikan oleh orang tua terhadap anak. Kenyataannya di lapangan bahwa anak difabel yang hanya memperoleh pendidikan di SLB, pada umumnya belum menunjukkan kemandirian yang diharapkan. Oleh karena itu, jika pendidikan anak hanya diberikan dengan disekolahkan di SLB, sangatlah kurang untuk dapat mengembangkan potensinya. Peran terbesar dalam mendidik anak khususnya anak difabel ialah peran orang tua, baik itu dalam bidang akademis, moral maupun spiritual. Kedua, ditinjau dari hukum Islam, bahwa kurangnya waktu orang tua bagi anak yang disebabkan karena faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Sebagaimana diketahui bahwa tugas orang tua khususnya seorang ibu ialah yang bertanggung jawab atas perkembangan anaknya yang ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 233. Selain itu, alasan lain dari salah satu ayah dari anak difabel, menganggap bahwa dirinya adalah sebagai kepala keluarga yang hanya bertugas mencari nafkah, bukan mengurus anak. Allah telah menjelaskan betapa pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak. Ayah mempunyai tanggung jawab atas anak-anaknya baik itu dalam pendidikan moral maupun spritual. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Luqman ayat 13,16, 17, 18, 19, dan 20. Bagi orang tua yang sama-sama bekerja, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah. Masing-masing mempunyai peran secara bersama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Pengetahuan orang tua sangatlah diperlukan terutama bagi ibu sebagai pengasuh utama anak selain itu juga harus didukung oleh seorang ayah untuk memaksimalkan potensi anak terutama bagi anak difabel.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rousan Fikri

NPM : 1521010033

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KELUARGA TERHADAP ANAK DIFABEL (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung)**” adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung, 25 Juni 2020
Yang Menyatakan,

Rousan Fikri



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Rousan Fikri

NPM : 1521010033

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap

Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi,

Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Zuhraini S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Eti Karjini, S.H., M.Hum.

NIP. 197308162003122003

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal al-Syakhsiyyah)**

Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN KELUARGA TERHADAP ANAK DIFABEL** (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung), disusun oleh **Rousan Fikri, NPM. 1521010033**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 Oktober 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



Khairuddin, M.H
196210221993031002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (al-Nisa>’ [4] :9)¹



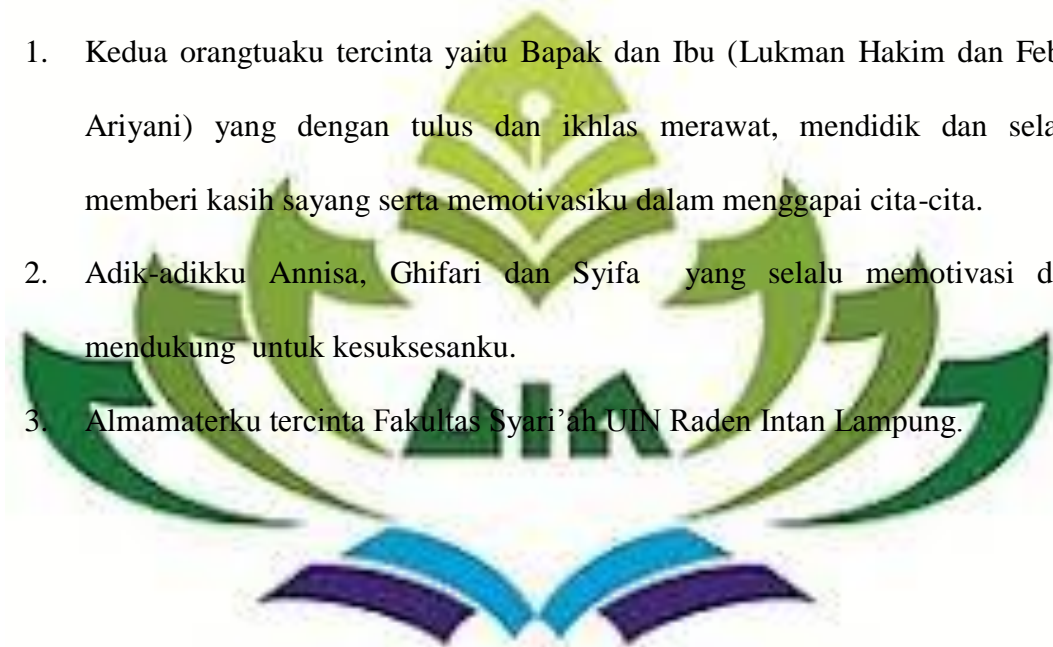
¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 201

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah swt, Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Lukman Hakim dan Febri Ariyani) yang dengan tulus dan ikhlas merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku dalam menggapai cita-cita.
2. Adik-adikku Annisa, Ghifari dan Syifa yang selalu memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rousan Fikri. Dilahirkan pada tanggal 7 September 1996 di Bandar Lampung, putra pertama dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Lukman Hakim dan Ibu Febri Ariyani.

Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak di TK Qurrota'ayun Lampung, pada tahun 2003. Melanjutkan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN 2 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah swt., shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Eti Karini, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Guru, dan Ustadz yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.
7. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik, terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain,
9. Sahabat-sahabatku Muhammad Ridho, Peri Purnomo Shidiq, Hervianis Virdya Jaya, dan Husnul yang selalu ada dalam suka dan duka.
- 10.Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2015, teman-teman PPS dan KKN dalam menuntut ilmu serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.
Jazakumullah.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Keluarga.....	16
1. Definisi Peran Keluarga.....	16
2. Perkembangan Pemahaman Diri Anak Usia Sekolah.....	21
3. Fungsi Keluarga.....	22
4. Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Anak.....	22
5. Peran Keluarga Anak Difabel.....	24
B. Peran Keluarga Terhadap Anak Dalam Islam.....	25
C. Konsep Difabel.....	31
1. Pengertian Difabel.....	31
2. Jenis-Jenis Difabel.....	40
3. Hak-Hak Difabel.....	51
D. Tinjauan Pustaka.....	

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	54
1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	54
2. Letak Geografi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	55

3. Data Monografi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	55
B. Peran Keluarga terhadap Anak Difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung	67
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas pokok bahasan, maka diperlukan penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung)**. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.15.

²Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014), h.15.

3. Peran Keluarga

Peran adalah sesuatu yang diharapkan secara normatif dari seorang dalam situasi sosial tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan. Peran dalam keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seorang dalam konteks keluarga. Jadi, peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.³

4. Anak Difabel

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁴ Sedangkan difabel adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi, anak difabel ialah seorang lelaki atau perempuan

³ Jason Sukmadie, "Komunikasi Keluarga Antara Orang Tua dan Adik Terhadap Kakak Penyandang Autisme", *Jurnal E-Komunikasi* Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2017), h. 3 (on-line) tersedia di: <https://www.neliti.com/id/publications/186384/komunikasi-keluarga-antara-orang-tua-dan-adik-terhadap-kakak-penyandang-autisme>, diakses tanggal 12 mei 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 56

yang belum dewasa yang memiliki gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang di maksud dengan judul keseluruhan, yaitu suatu proses perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (difabel) ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Alasan objektif

Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang peran keluarga terhadap anak disabilitas dengan meneliti anggota keluarga yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung ditinjau dari hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan ini belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung).
- b. Adanya suatu kemudahan untuk memperoleh data, sesuai dengan keahlian yang dimiliki, dana yang memadai dan waktu yang tersedia.

- c. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari'ah terutama jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).

C. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Bahkan merupakan lingkungan sosial yang pertama dikenal oleh anak atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu mengenal kehidupan sosial pertama di dalam lingkungan keluarga.

Anak adalah titipan dan amanah dari Allah SWT yang harus senantiasa kita jaga semata-mata untuk mendapatkan rahmat-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taghabun ayat 15:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."⁵

Anak adalah anugerah yang menyejukkan mata dan merupakan nikmat dari Allah swt. Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang sholeh, sholehah taat pada Allah swt dan orang tua. Dibalik keceriaan sang anak, sesungguhnya dia membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua. Begitu

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubni (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 402.

pula orang tua, segala yang terbaik ingin diberikan sebagai tanda cinta bagi sang buah hati, karena si buah hati bagai tak ternilai harganya. Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang kuat dan jiwa baik pada anak didalam keluarga, diperlukan terciptanya suasana keluarga yang harmonis dan dinamis, hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak.⁶

Setiap anggota keluarga mempunyai perannya masing-masing. Peranan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Peran Ayah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, rasa aman, sebagai kepala keluarga, anggota masyarakat. Peran Ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh atau pendidik anak, pencari nafkah tambahan, anggota masyarakat. Peran anak sebagai peran psikososial sesuai tingkat perkembangan baik mental, fisik, sosial dan spiritual. Kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Kemandirian seperti halnya psikologis yang lain, dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan sejak dini. Hal ini berlaku bagi semua anak, baik yang memiliki keadaan fisik dan mental yang normal, maupun yang memiliki

⁶ Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol 10 No. 2 Oktober 2011, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2011), h. 144 (on-line) tersedia di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/2887/2570>, (diakses tanggal 14 Mei 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

keterbelakangan fisik dan atau mental atau yang disebut juga dengan istilah penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Anak berkebutuhan khusus hidup di masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit. Masyarakat tidak seyogyanya menutup mata mengenai keberadaan anak berkebutuhan khusus. Anak-anak ini membutuhkan stimulasi tumbuh kembang, penanganan khusus dari keluarga serta instansi sekolah, dan yang sangat penting adalah kebutuhan kasih sayang dan perhatian dari orangtua dan orang-orang dewasa di sekitarnya.

Anak difabel atau yang dengan kata lain dapat disebut juga anak berkebutuhan khusus, membutuhkan beberapa perhatian lebih dari anak normal biasa, seperti terapi khusus, bagi orang tua mengikuti perkembangan anak, ikut mempelajari apa yang harus dilakukannya terhadap anak ABK dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya anak itu mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan, orang tua sebagai pendidik utama dalam proses tumbuh kembang anak mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap hal tersebut. Orang tua wajib untuk memberikan anak pendidikan, baik di dalam sekolah maupun dalam keluarga. Orang tua wajib untuk

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1).

memfasilitasi kebutuhan anaknya, terlebih lagi anak berkebutuhan khusus yang perlu perhatian yang sangat ekstra dalam proses belajar-mengajarnya. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang berasal dari keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lemah serta yang kedua orang tuanya sibuk bekerja mencari nafkah? Sebagaimana yang terjadi pada salah satu keluarga yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, yang memiliki anak difabel dengan kondisi ekonomi keluarga menengah kebawah. Anak difabel tersebut hanya sekedar disekolahkan di Sekolah Luar Biasa yang berlokasi di Bandar Lampung. Kedua orang tuanya sama-sama bekerja dari pagi hingga sore begitu pun dengan ketiga kakaknya, sehingga anak itu tidak mendapat perhatian khusus yang seharusnya ia dapat sebagaimana anak difabel lain yang mendapatkan perhatian khusus, lebih dari anak normal lainnya. Dengan kondisi seperti ini, sedikit kemungkinan orang tua untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan memberi perhatian lebih di rumah dan bahkan terapi khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah masyarakat Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang memiliki anggota keluarga anak difabel yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran keluarga terhadap anak difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak difabel?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran keluarga terhadap anak difabel di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai peran keluarga terhadap anak difabel.

G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam.

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁸ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.⁹ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung guna memperoleh data yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam tentang peran keluarga terhadap anak difabel.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada di peroleh secara jelas dan terperinci, sekaligus

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

⁹ Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h.2

menganalisa penelitian yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.¹⁰

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.¹¹

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.¹² Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini yang harus

¹⁰Susiadi As, *Methodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 23

¹¹Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

¹²J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2003), h. 20

¹³*Ibid*, h. 106

ditelaah, yakni hasil wawancara dengan keluarga yang memiliki anak difabel yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya.¹⁴ Buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini seperti buku yang berjudul Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan karya M. Efendi, Psikologi Anak Luar Biasa karya T.S. Soemantri dan lain-lain.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum yang primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.¹⁵ Diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian,¹⁶ yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁷ Sampel diperoleh

¹⁴ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jkaarta: Rineka Cipta, 2003) h. 67

¹⁵ *Ibid*, h. 68

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet. 7, h. 115

¹⁷ *Ibid*., h. 117

dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir, mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.¹⁸ Alasan menggunakan teknik ini ialah karena dekat dari kampus UIN Raden Intan Lampung, keterbatasan waktu, dan data tersebut didapat dari informasi salah satu keluarga yang memiliki anggota keluarga anak difabel. Oleh karena itu, sampel dari penelitian ini adalah enam (6) orang masyarakat Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung yang memiliki anggota keluarga anak difabel.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan, di mana peneliti tidak turut ambil bagian kegiatan orang yang di observasi.

¹⁸ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 1998, h.63

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.¹⁹ Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon.

Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan keluarga yang memiliki anak difabel di Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.

¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013), h. 95

²⁰*Ibid*, h. 329

5. Teknik Pengolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya dengan cara:

- a. Pemeriksaan data adalah mengorek siapakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan selesai di edit, ditandai dan di ikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.²¹ Metode analisa data yang dilakukan secara kualitatif, dalam metode ini berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum dan deduktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kaedah yang bersifat khusus. Dengan metode ini penulis dapat

²¹ Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Peneitian* (Jkaarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.

menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data penulis akan mengolah data yang dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga

1. Definisi Peran Keluarga

Peran merupakan suatu perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan dalam satuan tertentu. Setiap anggota keluarga akan memiliki peran masing-masing di dalam keluarga tersebut. Ayah sebagai pemimpin, pencari nafkah, pendidik atau pengayom, dan pemberi rasa aman pada setiap anggota keluarga. Ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik anak-anak, pelindung keluarga. Selain itu, sebagai anggota masyarakat anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual.²² Peran keluarga sangat penting dalam tahap-tahap perawatan kesehatan yaitu mulai dari tahapan peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan sampai, dengan tahap rehabilitasi.²³

Peran dalam anggota keluarga dijalankan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga yang akan dijalankan melalui peran formal maupun peran informal. Peran formal yang akan dijalankan oleh keluarga menentukan tercapainya keseimbangan dalam keluarga. Peran informal adalah peran

²²Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGC, 2010), h. 45.

²³Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 23.

sebagai pemberi dorongan, peran dalam mempertahankan keharmonisan,²⁴ peran untuk kompromi, peran untuk memulai atau berkontribusi dalam menghadapi suatu masalah, peran sebagai pelopor, dan peran sebagai koordinator. Kekuatan keluarga menunjukkan kemampuan dalam sistem keluarga untuk dapat mengubah perilaku anggota keluarga.²⁵

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang perannya penting dalam membentuk kebudayaan yang sehat. Keluarga dijadikan sebagai unit pelayanan karena masalah kesehatan pada keluarga akan saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi pada sesama anggota keluarga atau masyarakat sekitarnya.²⁶ Friedman mengklasifikasikan peran keluarga menjadi 2, yaitu peran formal dan informal yang meliputi:

a. Peran formal

Peran formal terdiri atas dua bagian yaitu peran parental dan peran perkawinan.

1) Peran parental

a) Peran sebagai *provider* (penyedia)

Peran ini merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki keluarga dalam menyediakan fasilitas tempat tinggal,

²⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h. 808, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juni 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

²⁵ Supratini, *Konsep Dasar Keperawatan Anak*, (Jakarta: EGC, 2004), h. 62.

²⁶ Harnilawati, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, (Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam, 2013), h. 33.

tempat belajar, menyediakan obat, dan menyediakan kebutuhan keluarga.

b) Peran sebagai pengatur rumah tangga

Peran ini merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki keluarga dalam mengatur rumah tangga.

c) Peran perawatan anak

Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki keluarga untuk melaksanakan proses atau melaksanakan pemeliharaan kesehatan anak dalam keadaan sakit maupun sehat.

d) Peran sosialisasi anak

Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki keluarga untuk melaksanakan perannya dalam mengajarkan anak bersosialisasi kepada teman, lingkungan sekitar dan masyarakat.

e) Peran persaudaraan

Peran ini merupakan tingkah laku yang dimiliki keluarga untuk memelihara keharmonisan dari masing-masing anggota keluarga.

f) Peran terapeutik

Peran ini merupakan tingkah laku yang diharapkan dimiliki keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

2) Peran perkawinan



Peran perkawinan merupakan kebutuhan bagi pasangan untuk memelihara suatu hubungan perkawinan yang kokoh. Anak-anak terutama, akan dapat mempengaruhi hubungan perkawinan.²⁷

b. Peran informal

1) *Inisiator contributor*

Inisiator contributor yaitu mengemukakan dan mengajukan ide-ide baru atau cara-cara yang dapat mengingat masalah atau tujuan-tujuan. Peran ini sebagai suatu “penggerak” atau peran yang dicirikan sebagai suatu tindakan.

2) Peran pendamai (*Compomiser*)

Peran pendamai adalah merupakan suatu peran yang dapat mengambil hati seseorang dan selalu mencoba menyenangkan perasaan orang disekitarnya, tidak pernah tidak setuju dan berbicara atas nama kedua belah pihak.

3) Perawat keluarga

Perawat keluarga yaitu anggota yang diperlukan untuk mengasuh dan merawat anggota lainnya yang membutuhkan.

4) Koordinator keluarga

Koordinator keluarga yaitu peran yang dapat mengatur dan merencanakan aktivitas keluarga, dengan demikian meningkatkan kohesivitas dan melawan perpecahan yang ada di dalam keluarga.²⁸

²⁷ Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset Teori dan Praktik*, Edisi 5, (Jakarta: EGC, 2010), h. 21

Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tugas dalam perkembangan yang harus dicapai agar tercapainya kepuasan selama pada tahap perkembangan serta mampu berkembang secara sukses pada tahap berikutnya. Setiap melaksanakan tahap perkembangan, keluarga memiliki tugas perkembangan atau harapan peran tertentu. Tugas perkembangan keluarga lebih cenderung dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab yang harus dicapai oleh keluarga pada setiap tahap perkembangan keluarga sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan biologis, penekanan budaya keluarga dan aspirasi nilai keluarga itu sendiri.²⁹

Menurut Friedman, tugas perkembangan di dalam keluarga merupakan suatu tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh setiap keluarga agar mendapatkan kepuasan selama tahap perkembangan dan mampu berkembang secara sukses pada tahap selanjutnya. Setiap tahap perkembangan keluarga memiliki tugas perkembangan atau harapan peran tertentu. Tugas perkembangan keluarga akan lebih cenderung dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab yang harus keluarga capai pada setiap tahap perkembangan keluarga sehingga, keluarga dapat memenuhi kebutuhan biologis, penekanan budaya keluarga dan nilai keluarga.³⁰

Tugas perkembangan keluarga akan timbul ketika keluarga sebagai unit yang berjuang keras untuk dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan pada

²⁸ *Ibid.*

²⁹ L. Donna Wong, *Pedoman klinis Keperawatan Pediatrik*, (Jakarta: EGC, 2008), h. 11

³⁰ Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset Teori dan Praktik*, Edisi 5, (Jakarta: EGC, 2010), h. 45

anggota keluarga dan memenuhi dalam kebutuhan perkembangan keluarga secara individual.³¹

2. Perkembangan Pemahaman Diri Anak Usia Sekolah

Pada usia sekolah dasar, pemahaman diri atau konsep anak mengalami perubahan yang sangat pesat. Menurut Santrock,³² perubahan-perubahan ini dapat dilihat sekurang-kurangnya meliputi tiga karakteristik pemahaman diri yaitu, karakteristik internal, karakteristik aspek-aspek sosial dan karakteristik perbandingan sosial.

a. Karakteristik internal

Anak usia sekolah dasar lebih memahami dirinya melalui karakteristik internal dari pada melalui karakteristik eksternal. Anak-anak pada masa pertengahan dan akhir lebih cenderung mendefinisikan dirinya melalui keadaan-keadaan dalam yang subjektif dari pada melalui keadaan-keadaan luar.

b. Karakteristik aspek-aspek sosial

Selama tahun-tahun sekolah dasar, aspek-aspek sosial dari pemahaman dirinya juga akan meningkat.

c. Karakteristik perbandingan sosial

Pemahaman diri anak-anak usia sekolah dasar juga mengacu pada perkembangan sosial. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak

³¹ *Ibid.*

³² Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 90.

cenderung membedakan diri mereka dengan orang lain secara komparatif dari pada secara *absolut*.

3. Fungsi Keluarga

Secara umum fungsi keluarga dibagi dalam beberapa tahapan antara lain:

a. Fungsi afektif (*the affective function*)

Merupakan fungsi keluarga yang utama untuk mnegajarkan dalam segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga yang akan berhbungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan dan psikososial anggota keluarga.

b. Fungsi Sosialisasi (*socialization and social placement function*)

Keluarga akan memfasilitasi sosialisasi primer anak yang akan bertujuan untuk menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang produktif.

c. Fungsi Reproduksi (*the reproductive function*)

Keluarga akan mempertahankan kontinuitas selama beberapa generasi dan untuk keberlangsungan dalam hidup bermasyarakat.

d. Fungsi Ekonomi (*the economic function*)

Keluarga akan menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi yang efektif.

e. Fungsi Perawatan Kesehatan (*the health care function*)

Keluarga akan memberikan kebutuhan fisik yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan keluarga.

4. Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Anak

Peran orang tua dibutuhkan bagi anak dalam memperkembangkan keseluruhan pada dirinya, selain itu juga akan bergantung pada fase perkembangannya. Pada fase ini dimana anak akan bergantung sepenuhnya pada orang lain yang paling utama dan pertama yang akan bertanggungjawab adalah orang tua sendiri. Orang tua bertanggungjawab memperkembangkan keseluruhan dari eksistensi anak tersebut. Tanggung jawab orang tua kepada anak ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak baik dari sudut organisasi-psikologi antara lain makan, kebutuhan psikis seperti; kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan akan rasa dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, dan ucapan-ucapan perlakuan.³³

Anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang ke arah suatu gambaran kepribadian yang harmonis dan matang, serta akan berkembang tanpa gangguan-gangguan dan penyakit hingga menjadi anak yang sehat, ideal sesuai dengan umurnya. Adapun dilihat dari segi intelektualnya anak akan mencapai prestasi secara optimal sesuai dengan potensi-potensi, sehingga tidak akan mengalami hambatan dalam pelajaran, serta dilihat dari karakter logisnya anak akan memperlihatkan aspek-aspek tingkah laku yang baik, dapat mengadakan hubungan-hubungan interpersonal dengan adekuat dan tidak mengalami ketegasan psikis. Pengasuhan, perawatan,

³³ Gunarsa, "Psikologi Perkembangan", *Gunung Mulia*, (online), tersedia di: <https://books.google.co.id/books?id=qI7V4VHByQ0C&pg=PA5&dq=peran+orang+tua+pada+setiap+tahap+perkembangan+anak&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjyYXm9o3LAhWBG14KHSqXcQ6AEIRzAI#v=onepage&q=peran%20orang%20tua%20pada%20setiap%20tahap%20perkembangan%20anak&f=false> (diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 15.00 WIB).

sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak terhadap anak hendaknya memperhitungkan keadaan anak. Orang tua dapat membantu memberikan tercapainya kebutuhan anak baik kebutuhan material maupun non material.³⁴

Keluarga dengan anak usia sekolah merupakan salah satu tahap yang harus dilalui dan merupakan masa-masa yang sangat sibuk bagi orang tuanya dan banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Pada tahap ini tugas perkembangan keluarga yaitu:

- a. Mensosialisasikan anak dengan lingkungannya, termasuk keberhasilan dalam belajar dan kebutuhan dengan teman sebayanya;
- b. Mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis;
- c. Memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga (seperti kebutuhan pakaian, makan dan minum serta tempat tinggal);
- d. Mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual;
- e. Menyediakan aktivitas untuk anak.³⁵

5. Peran Keluarga Anak Difabel

Penyakit serius atau difabel dalam jangka panjang dalam satu anggota keluarga akan mempengaruhi keluarga dan fungsinya, sebagaimana perilaku keluarga dan anggota keluarga akan mempengaruhi terhadap perjalanan dan karakteristik penyakit atau disabilitas. Keluarga yang terlambat dalam memenuhi tugas perkembangan akan terdapat interaksi antara tuntutan atau stressor perkembangan dan stressor situasional dalam keluarga secara

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Friedman, *Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGC, 1998), h. 24.

berlebihan. Bertambahnya kedua stress keluarga akan menghasilkan rendahnya fungsi keluarga.³⁶

Hal yang perlu dilakukan dalam membantu orang tua menangani anak difabel adalah bahwa mereka adalah individu yang berbeda-beda dan harus diperlakukan dengan cara yang berbeda.³⁷

B. Peran Keluarga Terhadap Anak Dalam Islam

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Demikianlah firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلٍ ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”³⁸

Memang, anak adalah nikmat dan karunia dari Allah Swt yang tiada terhingga nilainya. Setelah menikah, mayoritas manusia mendambakan seorang anak. Jika tidak diperoleh juga mereka akan berusaha untuk bisa berketurunan atau mengangkat anak (adopsi). Anak adalah amanat dari Allah SWT yang harus dipelihara dan diarahkan ke jalan yang diridhai oleh Allah lantaran

³⁶ Friedman, *Keperawatan Keluarga: Riset Teori dan Praktik*, Edisi 5, (Jakarta: EGC, 2010), h. 67.

³⁷ Dukes dan Smith, *Cara Menangani Anak Berkebutuhan Khusus: Pendidikan Khusus Panduan Guru dan Orang Tua*, (Jakarta: Indeks, 2009), h. 78.

³⁸ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013) h. 299.

manusia diciptakan untuk mengabdikan (beribadah) kepadanya-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”³⁹

sejalan dengan ini, orang tua memiliki kewajiban-kewajiban terhadap anak, di antaranya:

1. Air susu ibu

Ibu adalah nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya. Maksudnya seorang ayah diharuskan oleh agama untuk menyediakan orang yang dapat menyusui anaknya. Ia harus membayar orang untuk menyusui anaknya apabila isterinya tidak mau menyusunya. Sedangkan seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya secara transendental (antara dirinya dengan Tuhannya), bukan secara formal perundang-undangan. Kecuali apabila anaknya sama sekali tidak dapat lepas dari air susu ibunya, atau tidak ada wanita lain yang dapat menyusunya, atau tidak mau menyusui kepada wanita lain selain ibunya.⁴⁰

2. Pengasuhan

Pengasuhan ialah mendidik anak dan mengurus segala keperluan oleh orang yang diperintahkan secara resmi untuk mengasuhnya. Ibu adalah orang

³⁹Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013) h. 451.

⁴⁰Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cetakan Kedua, (Surabaya: PT elBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), h. 128.

pertama yang bertanggungjawab untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain.⁴¹

3. Memberikan Kasih Sayang dan Perlindungan

Sikap keibuan dan kebapakan adalah dua kasih sayang yang tinggi nilainya dan bersumber dari kedua orang tua yang harus diberikan kepada buah hati mereka, di samping harus mengemban kesulitan dan pengorbanan.

Orang tua harus menutup kekerasannya dengan sampul kasih sayang dan kelembutan. Kekerasan yang belas kasih dan kasih sayang yang keras merupakan asas pendidikan rumah yang hendaknya dijadikan sandaran oleh pemimpin keluarga. Dengan kasih sayang, pertumbuhan kepribadian anak menjadi sempurna dan dapat melaksanakan risalahnya dalam kehidupan dengan sabaik mungkin. Ibu melaksanakan peran yang besar bagi anaknya sejak janin di alam rahim, hamil dan melahirkan.

Kasih sayang orang tua terhadap anak harus dengan kadar yang masuk akal dan bijka, yakni kasih sayang yang disertai dengan hikmah dan cita yang bercampur kekerasan, tidak berlebihan dan tidak lalai, tidak membiarkan anak bermain semaunya dan bergaul dengan orang yang diinginkan tanpa ada pengawasan. Hal ini lantaran anak kecil apabila tidak mendapat kasih sayang ia akan menyimpang dan jika diberikan kasih sayang yang berlebihan juga demikian.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

4. Memberi Nama yang Baik dan Bermakna

Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberi nama yang baik dan bermakna serta memperlakukannya dengan baik pula. Nama yang baik perlu diberikan kepada anak karena ia merupakan doa di samping nanti di hari kiamat manusia akan di panggil dengan namanya tersebut.⁴³

Adapun di antara nama-nama yang baik adalah yang sesuai dengan tuntutan syariat dan memiliki arti mulia, seperti nama-nama para nabi dan yang mempunyai arti kehambaan, seperti Abdullah, Abdurrahman, dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis nabi:

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

Artinya: "Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman." (HR. Muslim)⁴⁴

5. Memberikan Pendidikan yang Baik

Pendidikan anak adalah kewajiban orang tua, dimana keluarga adalah lingkungan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Oleh sebab itu, keluarga yang harmonis, sakinah dan didasari nilai-nilai agama harus benar-benar diciptakan dan diusahakan sebaik mungkin.

Adapun tahapan pendidikan anak hendaknya dimulai sejak anak dalam kandungan atau disebut dengan pendidikan sebelum lahir (pranatal). Hal ini

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Hadis Riwayat Muslim No. 2132

penting karena adanya jalinan kasih antara ibu dengan anaknya yang masih dalam rahim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَمْرَأَةٌ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: "Ingatlah setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam yang memimpin orang banyak adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Budak (pembantu) seorang adalah pemimpin atas hartanya majikannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari No. 844)⁴⁵

Selain itu, dalam hadis lain disebutkan:

*"Ajarkanlah anakmu, karena engkau akan dipertanyakan tentang dirinya, apa yang engkau didikan kepadanya? Apa yang engkau ajarkan kepadanya? Dan sebaliknya ia juga akan dipertanyakan tentang baktinya kepadamu serta ketaatannya kepadamu"*⁴⁶

6. Memperlakukan Anak dengan Adil

⁴⁵ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar as-Shabu, t.t) h. 139.

⁴⁶ Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 12.

Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, ia juga berkewajiban untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya itu. Orang tua tidak boleh membedakan yang satu dengan yang lain, yang laki-laki dengan wanita, baik dalam kasih sayang yang bersifat moril maupun dalam hal-hal yang bersifat material.⁴⁷

Sikap adil ini bukan berarti memberikannya porsi yang sama, tetapi menempatkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Sikap ini perlu diperhatikan sebab ketidakadilan akan menjadikan sebagian anak merasa diabaikan yang dikhawatirkan kelak tidak memilih rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang tua. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 8

وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ

Artinya: "...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."⁴⁸

Dalam hadis Rasulullah saw:

التَّقْوٰى لِلّٰهِ, وَاعْدِلُوْٓا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ

Artinya: "Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu". (HR. Muslim).

Dalam suatu riwayat lain disebutkan bahwa Fatimah Al-Anbariyah pernah ditanya: "Anakmu yang mana yang paling engkau sukai? Jawab

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013) h. 150.

Fatimah: mereka bagaikan *halaqah* (tempat) yang dikosongkan tidak diketahui mana ujungnya. Maksudnya dari jawaban Fatimah ini adalah bahwa anaknya sama-sama dicintai dan tidak ada yang dibeda-bedakan.

C. Konsep Difabel

1. Pengertian Difabel

Di Indonesia istilah bagi orang yang memiliki keterbatasan mental dan atau fisik biasa disebut dengan difabel, penyandang disabilitas atau juga bagi anak-anak biasa disebut sebagai anak berkebutuhan khusus (ABK). Kata difabel pada awalnya marak digunakan oleh para aktivis isu disabilitas di daerah Yogyakarta dan Jawa. Difabel merupakan gabungan dari dua kata yaitu *differently able* atau dapat juga *different ability*. Maksud dari istilah tersebut ialah untuk menunjukkan bahwa difabel itu bukan cacat atau kekurangan, tetapi melakukan ssuatu dengan cara yang berbeda. Jadi, konotasinya lebih positif dibandingkan kata cacat atau *disabled*.

Sedangkan istilah penyandang disabilitas muncul menjelangratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on The Rights of Person With Disability*). Menjadi serapan dari *Person With Disability* (PWD), dipakailah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.⁵⁰

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.⁵¹ Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada pokok-pokok isi konvensi bagian pembukaan pada angka 1 dijelaskan pengertian penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap

⁴⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 504.

⁵⁰Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012), h. 293.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat (1)

masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁵²

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada pokok-pokok isi konvensi bagian pembukaan pada angka 1 dijelaskan pengertian penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁵³

Masyarakat mengenal istilah disabilitas sebagai seorang yang menyandang cacat. Inilah yang secara kasat mata yang membuat kita mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang kehilangan anggota atau struktur tubuh seperti kaki/tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian disabilitas diidentikkan dengan kecacatan, hal inilah yang menyebabkan *undercoverage*, sehingga pendataan disabilitas yang mengacu pada konsep kecacatan akan menghasilkan data yang *underestimate*.⁵⁴

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

⁵² Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁵³ Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁵⁴Bps Dukung Hak Penyandang Disabilitas, tersedia di:
<http://www.bps.go.id/aboutus.php?info=91>(di akses pada tanggal 18 Mei 2020)

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵⁵

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan perbedaannya dengan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di antaranya pada istilah yang digunakan, dari kata “penyandang cacat” diganti “penyandang disabilitas”. Alasan diubahnya istilah tersebut ialah bahwa UU No. 4 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru⁵⁶, yaitu UU No. 8 Tahun 2016.

Adapun pengertian disabilitas yang dikemukakan oleh *Disabled People's International* (DPI) adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal didalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.⁵⁷

Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada kemampuan mental, emosi, atau fisik. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pasal 5 ayat (2), bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.⁵⁸

⁵⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1)

⁵⁶Konsideran Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵⁷Kusmana, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), h.105

⁵⁸Ratih Putri Pratiwi, Afir Murtiningsih, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 14

Terdapat perbedaan konseptual antara kata difabel dengan penyandang disabilitas. Difabel mengacu pada diri subjek yang memiliki kemampuan berbeda dibanding orang lain pada umumnya. Sedangkan kata penyandang disabilitas mengacu pada lingkungan di luar si subjek yang disabilitas. Ketika lingkungan di sekitar sudah akomodatif dan si subjek dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa halangan lagi, maka dia akan menjadi *person* yang seutuhnya tanpa sebutan disabilitas lagi.

2. Jenis-Jenis Difabel

Dalam membahas mengenai difabel, tidak hanya berpacu pada keterbatasan fisik seperti orang dengan pengguna kursi roda saja, namun ada jenis lain yang termasuk pada difabel atau disabilitas. Dalam istilah umum, *disable world* memberikan delapan kategori disabilitas, di antaranya adalah hambatan gerak dan gerik, disabilitas tulang belakang, disabilitas cedera kepala-otak, disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas kognitif atau belajar, gangguan psikologis dan disabilitas tak terlihat.⁵⁹

Kaum difabel menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, sebab mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses transportasi, bangunan, pekerjaan, dan pendidikan. Beberapa contoh tersebut merupakan hambatan dalam kehidupan sehari-hari kaum difabel. Kondisi tersebut tidaklah

⁵⁹ Sekilas Tentang Disabilitas, tersedia di: <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilastentang-disabilitas>, (diakses pada 25 Mei 2020)

menjadi alasan untuk mengeliminasi kaum difabel dalam memperoleh hak dan mempertahankan kehidupan.⁶⁰

Difabel atau bisa juga disebut sebagai penyandang cacat menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 1 terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik serta mental.⁶¹ Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.⁶²

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 4 tentang penyandang disabilitas terdiri 4 ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Yang dimaksud dengan ”penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat

⁶⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Edisi I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273

⁶¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

⁶² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat (1)

kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya: *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Menurut Frieda Mangunsong, secara umum klasifikasi atau jenis disabilitas dapat dibagi atas:⁶³

- a. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian D (SLB D) ialah seseorang yang menderita cacat polio atau lainnya. Sehingga mengalami ketidaknormalan dalam fungsi tulang, otot-otot atau koordinasi fungsi otot-otot. Akan tetapi pada umumnya mereka mempunyai kemampuan kecerdasan yang normal.

⁶³ Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006), h. 11

b. Penyandang cacat tubuh yang tergolong bagian (SLB DI) ialah seseorang yang menderita cacat semenjak lahir akibat kerusakan otak seperti penderita *cerebral palsy* yang mengakibatkan tidak berfungsinya tulang, otot, sendi dan syaraf-syaraf sehingga terjadi kelumpuhan, kekakuan dan kurangnya koordinasi motorik. Akibat adanya gangguan pada otak, maka sebagian sebagian besar dari penderita ini mempunyai kecerdasan yang tidak normal.⁶⁴

Sedangkan menurut Rita Pranawati Komisioner KPAI dalam dialog interaktif Peningkatan Peran serta Anak dalam Pembangunan Biro Bina Sosial Setda menjelaskan mengenai Perlindungan Anak berkebutuhan khusus terdapat beberapa jenis yaitu:

- a. Anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (total) atau sebagian
- b. Anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagai ataupun menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara
- c. Anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada dibawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan

⁶⁴ *Ibid.*

- d. Anak disabilitas fisik adalah anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau anggota gerak
- e. Anak disabilitas sosial adalah anak yang memiliki hambatan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta berperilaku menyimpang
- f. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH) atau *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD) adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan, yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi atau perhatian, hiperaktivitas dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berfikir, dan mengendalikan emosi.⁶⁵
- g. Anak dengan gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorders (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam tiga area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi
- h. Anak dengan gangguan ganda adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendamping, layanan, pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus
- i. Anak lamban belajar atau *slow learner* adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata tetapi belum termasuk

⁶⁵ *ibid*

gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik

j. Anak dengan kesulitan belajar khusus atau *specific learning disabilities* adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja dan berhitung

k. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif

l. Anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah anak yang memiliki skor inteligensi yang tinggi (*gifted*), atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus (*talented*) seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan.⁶⁶

3. Hak-Hak Difabel

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.⁶⁷ Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 174

dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.⁶⁸

Kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia yang mempunyai kondisi difabel atau penyandang disabilitas.

Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (*good will*) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka (2)

kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.⁶⁹

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut hak-hak penyandang disabilitas atau kaum difabel:

a. Hidup

Hak hidup untuk kaum difabel meliputi hak: atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.⁷⁰

b. Bebas dari Stigma

⁶⁹ Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1).

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.⁷¹

c. Privasi

Hak privasi untuk penyandang disabilitas yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah tangga dan keluarga, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi.

d. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk kaum difabel atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 7.

mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektual.

e. Pendidikan

Hak pendidikan untuk kaum difabel mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.⁷²

f. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk kaum difabel memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan kaum difabel dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas,

⁷² Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 12.

mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.⁷³

g. Kesehatan

Hak kesehatan untuk kaum difabel memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.⁷⁴

h. Politik

Hak politik untuk kaum difabel memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 11.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 12.

partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi kaum difabel dan untuk mewakili kaum difabel pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.⁷⁵

i. Keagamaan

Hak keagamaan untuk kaum difabel memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.⁷⁶

j. Keolahragaan

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 14.

Hak keolahragaan untuk kaum difabel melakukan melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan, menjadi pelaku keolahragaan, mengembangkan industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.⁷⁷

k. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk kaum difabel memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya, memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.⁷⁸

l. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk kaum difabel rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁷⁹

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 15.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 16.

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 17.

m. Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk kaum difabel mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

n. Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk kaum difabel memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.⁸⁰

o. Pelindungan dari Bencana

Hak Pelindungan dari bencana untuk kaum difabel mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.⁸¹

p. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk kaum difabel mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan,

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 19.

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 29.

bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.⁸²

q. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk kaum difabel berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh/memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

r. Pendataan

Hak pendataan untuk kaum difabel didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas.⁸⁴

s. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk kaum difabel, mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 21.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 25

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 22.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁵

t. Berekspresi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk kaum difabel memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.⁸⁶

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud di atas, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan
- d. diskriminasi berlapis; dan

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 23.

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 24.

- e. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain itu anak penyandang disabilitas juga memiliki hak antara lain:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.
- e. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- f. Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.⁸⁷

Dengan hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak kaum difabel atau penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia.

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

C. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian skripsi pada tahun 2015 karya Muhammad ‘Ainul Yaqin dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Akhlak Pada Anak Tunagrahita Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang (Perspektif Bimbingan Islam) “. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua terlibat aktif dalam menanamkan akhlak pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang. Peran orang tua pada anak tunagrahita tersebut dapat diklasifikasikan sebagai: orang tua mempunyai peran sebagai motivator, pembimbing, pemberi arahan atau contoh yang baik, pengawas, serta pemberi fasilitas kebutuhan belajar anak. Peran orang tua dalam menanamkan akhlak pada anak tunagrahita di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Semarang perspektif bimbingan Islam mendapatkan respon positif dari anak tunagrahita. Hal ini terlihat dari anak tunagrahita mampu menerapkan ajaran atau bimbingan- bimbingan Islam dari orang tuanya seperti halnya berlaku sopan santun pada orang tua, tidak berbicara kasar pada orang lain, mengucapkan salam ketika memasuki rumah, melakukan ibadah shalat dan membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. Orang tua menanamkan akhlak dengan memberikan serta mempraktikkan langsung materi-materi akhlak pada anak tersebut. Hal ini bertujuan agar anak tunagrahita meniru dan menerapkan serta membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penelitian skripsi pada tahun 2018 karya Verdian Heny Agustin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Potensi Keagamaan Anak Berkebutuhan Khusus Di Padang Kemiling Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: cara orang tua mengembangkan potensi keagamaan anak berkebutuhan khusus di Padang Kemiling Kota Bengkulu yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut : (1) memberikan arahan dan bimbingan (2) menjadi role model atau contoh sehari-hari untuk anak (3) membantu anak saat mengalami kesulitan (4) memotivasi dan memberikan dukungan (5) menemani anak ketika sedang mengikuti perlombaan. Adapun usaha yang dilakukan anak dalam mengembangkan potensi keagamaan, antara lain : (1) shalat 5 waktu tidak pernah terlambat (2) rajin berangkat ke TPQ (3) rajin ke masjid untuk belajar mengaji (4) mengikuti latihan rabbana (5) melukis kaligrafi (6) setiap bulan puasa dan hari-hari besar selalu ikut perlombaan.
3. Penelitian skripsi pada tahun 2016 karya Ditta Anggraini dari Universitas Jember, yang berjudul “Hubungan Pelaksanaan Peran Keluarga Dengan *Activity Daily Living* (Adl) Pada Anak Tunagrahita Di SLB-C TPA Kabupaten Jember”. Hasil analisis perbandingan pelaksanaan peran keluarga dan pemenuhan *activity daily living* (adl) pada anak tunagrahita dengan *p value* 0,002. Hasil hitung koefisien determinasi didapatkan 0,114 berarti 11,4% variable pelaksanaan peran keluarga memiliki sumbangan terhadap skor *activity daily living* dan 88,6% skor ADL dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Dari ketiga judul penelitian di atas tidak terdapat kesamaan dalam membahas permasalahan peran keluarga terhadap anak difabel yang dipandang melalui hukum Islam. Oleh sebab itu, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak Difabel (Studi Kasus Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung), perlu untuk diteliti lebih dalam oleh penulis karena sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti manapun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Amzah , 2014)
- Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975)
- Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGC, 2010)
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, *Kecamatan Sukabumi Dalam Angka 2018*, (Bandar Lampung: CV Jayawijaya, 2018)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta, 2013)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Departemen Sosial RI, *Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Direktorat Sosial RI, 2006)
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015)
- Dukes dan Smith, *Cara Menangani Anak Berkebutuhan Khusus: Pendidikan Khusus Panduan Guru dan Orang Tua*, (Jakarta: Indeks, 2009)
- Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009)

- Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012)
- Friedman, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset Teori dan Praktik*, Edisi 5, (Jakarta: EGC, 2010)
- Friedman, *Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: EGC, 1998)
- Friedman, *Keperawatan Keluarga: Riset Teori dan Praktik*, Edisi 5, (Jakarta: EGC, 2010)
- Harnilawati, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, (Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam, 2013)
- Imran, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Imran di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 20 Mei 2020.
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2003)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubi (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013)
- Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Kusmana, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007)
- L. Donna Wong, *Pedoman klinis Keperawatan Pediatrik*, (Jakarta: EGC, 2008)
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Edisi I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ke-10, edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Ratih Putri Pratiwi, Afin Murtiningsih, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cetakan Kedua, (Surabaya: PT elBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015)

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jkaarta: Rineka Cipta, 2003)

Supratini, *Konsep Dasar Keperawatan Anak*, (Jakarta: EGC, 2004)

Susiadi As, *Methodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Perundang-Undangan

Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal

Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” , *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/210/358> (16 Juni 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Darosy Endah Hyoseyamina, “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak”, *Jurnal Psikologi Undip*, Vol 10 No. 2 Oktober 2011, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2011) (on-line) tersedia di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/2887/2570>, (diakses tanggal 14 Mei 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jason Sukmadie, “Komunikasi Keluarga Antara Orang Tua dan Adik Terhadap Kakak Penyandang Autisme”, *Jurnal E-Komunikasi* Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 2017) (on-line) tersedia di: <https://www.neliti.com/id/publications/186384/komunikasi-keluarga-antara-orang-tua-dan-adik-terhadap-kakak-penyandang-autisme>, diakses tanggal 12 mei 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Website

Bps Dukung Hak Penyandang Disabilitas, tersedia di: <http://www.bps.go.dd/aboutus.php?info=91>(di akses pada tanggal 18 Mei 2020)

Gunarsa, “Psikologi Perkembangan”, *Gunung Mulia*, (online), tersedia di: <https://books.google.co.id/books?id=qI7V4VHByQ0C&pg=PA5&dq=peran+orang+tua+pada+setiap+tahap+perkembangan+anak&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjyYXm9o3LAhWBGi4KHSqXcQ6AEIRzAI#v=onepage&q=peran%20orang%20tua%20pada%20setiap%20tahap%20perkembangan%20anak&f=false> (diakses pada tanggal 23 Mei 2020, pukul 15.00 WIB).

Sekilas Tentang Disabilitas, tersedia di: [http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilastentang](http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/sekilas-tentang-disabilitas/102-sekilastentang%20disabilitas) disabilitas, (diakses pada 25 Mei 2020)

Wawancara

Desi, wawancara dengan penulis, on-line via whatsapp, pada 22 Juli 2020.

Dian dan Putri, wawancara dengan penulis, kediaman Dian dan Putri di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 23 Mei 2020.

Fira, wawancara dengan penulis, on-line via whatsapp, pada 23 Juli 2020.

Imran, wawancara dengan penulis, kediaman Bapak Imran di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 20 Mei 2020.

Marni, wawancara dengan penulis, kediaman Ibu Marni di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 20 Mei 2020.

Nur, wawancara dengan penulis, on-line via whatsapp, pada 24 Juli 2020.

Siti, wawancara dengan penulis, kediaman Siti di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, 20 Mei 2020.

Sri, wawancara dengan penulis, on-line via whatsapp, pada 23 Juli 2020.

Yanti, wawancara dengan penulis, on-line via whatsapp, pada 25 Juli 2020.